



BUPATI SOPPENG

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 1129/XII/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 126 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dan Bendahara Pengeluaran PPKD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada Lampiran I kolom 3 sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD dan pada Lampiran II kolom 3 sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2018 dengan atasan langsung sebagaimana tersebut pada kolom 5 Lampiran I dan II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas bendahara pengeluaran SKPD berwenang :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
 - f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- KEEMPAT** : Bendahara pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD.
- KELIMA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT di atas bendahara pengeluaran PPKD berwenang :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD;
- b. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD;
- c. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SOPPENG,



H. A. KAWADI RAZAK

Tembusan :

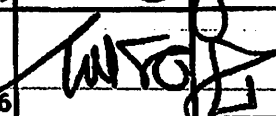
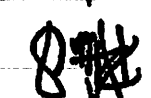
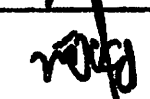
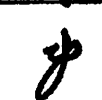
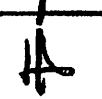
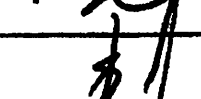
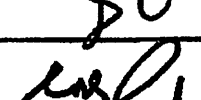
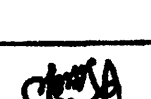
1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Watampone di Watampone.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Bank SulSelBar Cabang Soppeng di Watansoppeng.
5. Kepala Cabang Pembantu Bank Negara Indonesia 1946 di Watansoppeng.
6. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia di Watansoppeng.
7. Para Kepala Badan dan Dinas se Kabupaten Soppeng di tempat.
8. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Soppeng di Watansoppeng.
9. Para Camat se Kabupaten Soppeng di tempat.
10. **Arsip.**

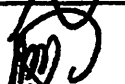
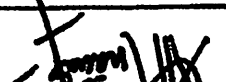
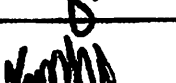
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 1129/XII/2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

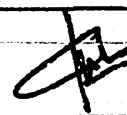
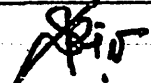
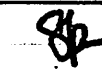
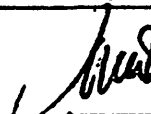
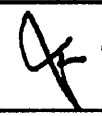
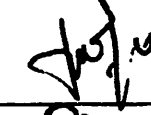
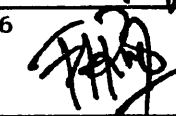
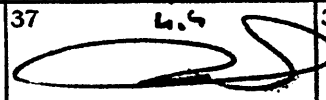
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD DAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2018

BENDAHARA PENGELUARAN SKPD

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL	JABATAN	ATASAS LANGSUNG	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN	ANDI RAHAYU, SE NIP. 19810315 200901 2 020 Penata Muda (IIIa)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	1	1
2	DINAS KESEHATAN	Hj. MULURIAH, SE NIP. 19671231 199403 2 049 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS KESEHATAN	2	2
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KAHARUDDIN, SE, MM NIP. 19840926 200901 1 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3	3
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	SRI FAHMIATI JAFAR, A.Md,Fi NIP. 19790130 200801 2 009 Penata Muda (IIIa)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	4
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ARIFIN TAPPE, S.IP NIP. 19770901 200901 1 005 Penata Muda (IIIa)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5	5
6	DINAS SOSIAL	MURNIATI NIP. 19711211 199804 2 001 Penata Muda (IIIa)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS SOSIAL	6	6
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Hj. HARTATI, S.Sos NIP. 19651231 198809 2 011 Penata Tk. I (III/d)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	7
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	MIRLIANI, SE NIP. 19821107 201001 2 024 Penata Muda / (IIIa)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8	8

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL	JABATAN	ATASAN LANGSUNG	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
9	DINAS PERIKAMAN DAN KETAHANAN PANGAN	HASMA A., SP NIP. 19780222 201001 2 003 Penata (III/c)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS PERIKAMAN DAN KETAHANAN PANGAN		
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	RAHMA DANIA, S.Sos NIP. 19790531 200801 2 009 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SRI MULYANA, S.Sos NIP. 19800910 200801 2 011 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BAHARTI, SE NIP. 19781018 200906 2 001 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	CHRISTIANI BO'NE, SE NIP. 19830803 201001 2 024 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
14	DINAS PERHUBUNGAN	MARIANA NIP. 19850910 201408 2 002 Pengatur Muda (II/a)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN		
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	MUSRIADI AP, SE NIP. 19810110 201408 1 003 Pengatur Muda (II/a)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
16	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	SITTI JAMILA, S.Ag NIP. 19730701 200701 2 014 Penata (III/c)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM		
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ALIMUDDIN SIMA, S.Kom. M.Si NIP. 19760610 200701 1 019 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
18	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	ASNAENI, S.Sos NIP. 19780518 200701 2 023 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA	ROSIDAH NIP. 19690806 201408 2 002 Pengatur Muda (II/a)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA		

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP / PAROKAT/GOL	JABATAN	ATASAN LANGSUNG	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
20	DINAS-PERPUSTAKAAN-DAN KEARSIPAN	AHMAD HIDAYAT NIP. 19831231 200901 1 012 Pengatur Muda Tk. I (IIB)	BENDAHARA PENGELUARAN	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		f
21	DINAS PERTANIAN	DARMAWATI, S.IP NIP. 19751231 200801 2 018 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN	KEPALA DINAS PERTANIAN		idm
22	BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	WINARNI, S.Sos NIP. 19750601 200701 2 023 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		W
23	BADAN PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH	HERAWATI, A.Md NIP. 19781231 200801 2 021 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN	KEPALA BADAN PENGENDALIAN KEUANGAN DAERAH		W
24	BADAN KEPENGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	SURIANI HANDAYANI, SE NIP. 19790112 200901 2 002 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN	KEPALA BADAN KEPENGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM		Sh
25	- SEKRETARIAT DAERAH - KEPALA DAERAH DAN WAKIL WAKIL KEPALA DAERAH	SUKARDI, SE NIP. 19780505 200701 1 026 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN	SEKRETARIS DAERAH		f
26	- DPRD - SEKRETARIAT DPRD	NURNAENI Z, SE, M.Si NIP. 19720725 200212 2 006 Penata (III/c)	BENDAHARA PENGELUARAN	SEKRETARIS DPRD		W
27	INSPEKTORAT DAERAH	AFRIANI, SE NIP. 19840404 201001 2 054 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN	INSPEKTUR KABUPATEN		W
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	HJ. NURHAYATI H. NIP. 19740924 199303 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENGELUARAN	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		W
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	FEBRI IRWANTO MARDIN NIP. 19850225 201001 1 004 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	BENDAHARA PENGELUARAN	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		f

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL	JABATAN	ATASAN LANGSUNG	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
30	KECAMATAN LALABATA	EVIAWARNI NIP. 19820728 201001 2 030 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	CAMAT LALABATA	30 	30 
31	KECAMATAN DONRI-DONRI	SRIWATY FAHMI, S.Sos NIP.19790702 200801 2 015 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	CAMAT DONRI-DONRI	31 	31 
32	KECAMATAN LILIRIAJA	SUHARTI, SE, MM NIP. 19800620 201001 2 021 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	CAMAT LILIRIAJA	32 	32 
33	KECAMATAN LILIRILAU	ANDI IRVIANTI, S.Sos NIP. 19781014 200901 2 005 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	CAMAT LILIRILAU	33 	33 
34	KECAMATAN MARIORIAWA	Hj. KAMARIAH NIP. 19820719 201001 2 026 Pengatur Muda Tk. I (IIb)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	CAMAT MARIORIAWA	34 	34 
35	KECAMATAN MARIORIWAWO	HASNAWATI, S.IP NIP.19760308 200701 2 020 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	CAMAT MARIORIWAWO	35 	35 
36	KECAMATAN GANRA	Hj. FITRIYANI, SE NIP. 19830301 200502 2 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	CAMAT GANRA	36 	36 
37	KECAMATAN CITTA	ASRIWANDI NIP. 19831122 201408 1 001 Pengatur Muda (IIa)	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	CAMAT CITTA	37 	37 

